

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan cita-cita dan amanat nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan nasional tidak akan dapat tercapai tanpa melibatkan semua pihak dalam mewujudkannya, yakni dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta lainnya. Pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi harus merata di semua sektor ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan nasional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terpaku pada industri besar, namun juga harus melibatkan industri kecil dan menengah, sehingga pendapatan yang merata di semua lini dapat tercapai dan kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Koperasi sebagai salah satu penopang perekonomian nasional, sangat memberikan andil dalam menciptakan perekonomian yang kokoh, melalui perannya dalam memberikan kesejahteraan pada masing-masing anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Undang-undang RI No. 25 tahun 1992, Koperasi didefinisikan sebagai Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas Asas kekeluargaan.

Perkembangan Koperasi di Indonesia pada dekade terakhir ini bisa dikatakan cukup signifikan. Berdasarkan data tahun berjalan 2017, jumlah koperasi yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM mencapai 153.170 unit dengan 26.769 juta Anggota. Sedangkan jumlah koperasi yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 80.008 Unit. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi meningkat jadi 3,99 persen dari 2013 yang hanya 1,71 persen (Metrotvnews.com, diakses pada tanggal 12 juli 2017).

Sementara itu, data tahun 2016 jumlah koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri telah mencapai 1.149 unit dengan 772 Koperasi aktif dan 377 koperasi tidak aktif. Adapun di kota Pangkalpinang jumlah koperasi yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pangkalpinang telah mencapai 203 unit dengan volume usaha sebesar Rp218.333.990.000. Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang memiliki jumlah dan volume usaha koperasi terbesar ketiga di Bangka Belitung setelah Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Induk (Dinas Koperasi dan UKM Bangka Belitung, 2016: <https://kukm.babelprov.go.id/content/provinsi-bangka-belitung/>, diakses 25 Januari 2018).

Perkembangan koperasi yang cukup baik seharusnya diiringi dengan adanya media informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil berbagai keputusan penting yang menyangkut dengan kelangsungan hidup koperasi, sehingga bisa tetap *survive* ditengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat. Media informasi ini adalah berupa laporan keuangan yang merekam

transaksi historis perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan masa depan (Martani,dkk 2012).

IAI (2009) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan modal, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi pihak internal yaitu Manajemen, Pemilik, maupun Karyawan, serta pihak eksternal seperti Kreditur dan Pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, bersifat materialitas, dapat diandalkan, substansi mengungguli bentuk, adanya pertimbangan sehat, lengkap, dapat dibandingkan, tepat waktu serta adanya keseimbangan antara biaya dan manfaat (IAI, 2009).

Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, sehingga laporan keuangan tersebut memiliki kredibilitas yang baik dan bermanfaat bagi pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap entitas tersebut, seperti Kreditur dan Pemerintah. Laporan keuangan yang akan didistribusikan kepada umum di Indonesia harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Di Indonesia dikenal istilah PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) yang merupakan istilah teknis akuntansi yang mencakup konversi aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu (Effendi, 2014:6).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Mei 2009 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari

011. Tujuan dari penerbitan standar ini adalah dalam rangka mempermudah Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam membuat laporan keuangan, karena PSAK Umum dianggap terlalu rumit untuk diterapkan oleh entitas tersebut. DSAK IAI mendefinisikan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sebagai Entitas yang ; (1) tidak memiliki akuntabilitas signifikan, dan (2) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, Kreditur, dan Lembaga Pemeringkat Kredit. Berdasarkan kriteria di atas, maka koperasi merupakan salah satu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan yang penggunaannya diotorisasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia no. 04/Per/M.UMKM/VII/2012 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi.

Sejak diterbitkan pada tahun 2009, masih banyak koperasi yang belum mengerti dan memahami tentang SAK ETAP, sehingga hanya sebagian kecil koperasi yang menerapkan standar tersebut dalam penyusunan laporan keuangannya (suryanti,dkk 2015). Suryanti, dkk juga menjelaskan bahwa faktor faktor yang menyebabkan koperasi masih belum menerapkan SAK ETAP diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang SAK ETAP oleh Pemerintah, penggunaan Software Akuntansi, serta Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten di bidang Akuntansi.

Setiap perusahaan dengan kriteria menengah ke bawah yang tidak memiliki akuntabilitas publik, wajib melaporkan laporan keuangan sebagai dasar pelaporan pajak. Laporan keuangan yang dilaporkan ke kantor pajak harus sesuai dengan SAK

ETAP. Namun demikian, laporan yang di buat tidak harus sesuai seratus persen dengan pedoman dalam SAK ETAP. Hal ini disebabkan setiap perusahaan memiliki jenis akun yang berbeda dalam laporan akuntansinya, tetapi tetap berpedoman dengan SAK ETAP. (wawancara dengan KPP Pratama Bangka)

Koperasi adalah salahsatu usaha yang diminati oleh masyarakat kecil dimana perusahaan jenis ini tidak perlu mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada publik karena tidak terdaftar di bursa efek indonesia. Selain itu, jumlah koperasi di Kota Pangkalpinang tahun 2016 saja sudah mencapai 203 unit. Hal ini membuktikan bahwa perkembangannya cukup diminati oleh masyarakat. Jika dilihat dari data koperasi primer dan sekunder menunjukkan bahwa terdapat 7 unit koperasi primer di daerah kota Pangkalpinang dan koperasi lainnya sebanyak 196 unit (kukm.babelprov.go.id/sites/default/files, diakses tanggal 12 Januari 2020).

Salahsatu koperasi primer yang ada di daerah Kota Pangkalpinang yaitu Primkop Kartika Jaya Bersama. Koperasi ini adalah salahsatu koperasi primer terbesar di pangkalpinang. Data tahun 2018 koperasi ini memiliki modal usaha sebesar Rp1.771.296.250 dan sisa hasil usaha sebesar Rp61.757.999. Sebagai salahsatu koperasi primer terbesar di Pangkalpinang seharusnya Primkop Kartika Jaya Bersama dapat menerapkan aturan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan seperti penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana penerapan SAK ETAP di Primkop Kartika Jaya Bersama dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pelaporan keuangan pada Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama ?
2. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka Penulis memberikan batasan masalah yaitu penelitian ini hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis laporan keuangan yang dibuat oleh Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama.

2. Untuk membuktikan bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai perkembangan implementasi Standar Akuntansi khususnya SAK ETAP, serta sebagai bahan dan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2. Kontribusi Praktis

Bagi Manajemen dan Pengurus Koperasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman Manajemen dan Pengurus Koperasi mengenai SAK ETAP serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga terciptanya laporan keuangan yang Transparan, Akuntabel serta adanya Globalisasi bahasa Laporan Keuangan demi kemajuan Koperasi kearah yang lebih baik.

3. Kontribusi kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak koperasi dalam mengambil kebijakan terkait dengan proses akuntansi yang

diterapkan pada koperasi, sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi dapat memberikan informasi yang andal bagi pengambilan keputusan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dari penelitian ini akan disajikan secara sistematis kedalam beberap bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa pembahasan data dan analisis deskriptif kualitatif tentang penerapan pelaporan keuangan dan SAK ETAP pada Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran baik untuk Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama maupun untuk penelitian selanjutnya.



